



A View from a Within: Formasi Identitas Kolektif ASEAN dalam Proses Perumusan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific

Muhammad Iqbal Hafizon

Universitas Padjadjaran, Indonesia; Iqbalhafizon98@cisdi.org

Rizki Ananda Ramadhan

Universitas Padjadjaran, Indonesia; rizki.ramadhan@unpad.ac.id

| Submit: 28-02-2024 | Accept: 09-08-2024 | Publish: 13-08-2024 |

Keywords

ASEAN, AOIP, Collective Identity Formation, ASEAN Centrality

ABSTRACT

This article delves into the evolution of the Indo-Pacific concept as a regional architectural framework. In a pivotal moment in 2018, the United States introduced the Free and Open Indo-Pacific Strategy, responding to growing geopolitical tensions and aiming to counter China's influence. Amidst this landscape, all ASEAN member states officially embraced the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) during the 34th ASEAN Summit in 2019. Employing Alexander Wendt's Collective Identity Formation framework, this research conducts a qualitative discourse analysis to scrutinize the process of ASEAN's discourse formation on the Indo-Pacific. Utilizing various data collection methods, including interviews and document analysis, the study unveils intricate interactions among ASEAN states in shaping the regional architecture discourse.

Kata Kunci

ASEAN, AOIP, Collective Identity Formation, ASEAN Centrality

ABSTRAK

Artikel ini membahas evolusi konsep Indo-Pasifik sebagai kerangka kerja arsitektur regional. Dengan momen penting pada tahun 2018, Amerika Serikat memperkenalkan Strategi Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka, merespons ketegangan geopolitik yang meningkat dan bertujuan untuk melawan pengaruh Tiongkok. Di tengah-tengah lanskap ini, semua negara anggota ASEAN secara resmi mengadopsi Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik (AOIP) selama KTT ASEAN ke-34 pada tahun 2019. Dengan menggunakan Formasi Identitas Kolektif dari Alexander Wendt, penelitian ini melakukan analisis wacana kualitatif untuk melihat proses pembentukan wacana ASEAN tentang Indo-Pasifik. Dengan menggunakan analisis diskursus, riset ini mengungkap interaksi yang rumit di antara negara-negara ASEAN dalam membentuk wacana arsitektur regional.

PENDAHULUAN

Vibhanshu Shekhar menyebut era Indo-Pasifik sebagai salah satu fase penting dalam perkembangan ‘peradaban Asia’ yang ditandai dengan meningkatnya kontestasi antar kekuatan berkepentingan, serta kompleksitas dalam penerjemahan kawasan (Shekhar, 2018). Hal tersebut dapat dibuktikan melalui kemunculan ‘*Contending vision*’ antar negara di dalam kawasan, baik yang dilakukan oleh dua *major power*, Amerika Serikat dan Tiongkok, maupun *new rising power* seperti India, Jepang, dan Australia. Pertarungan gagasan mengenai idealnya sebuah konstruksi kawasan berimplikasi terhadap perubahan struktur yang saat ini didominasi oleh nuansa rivalitas. Prof. Dewi Fortuna Anwar dalam wawancara bersama periset menyebutkan terdapat dua tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan struktur kawasan saat ini.

Pertama kebijakan geopolitik dan geoekonomi Tiongkok sebagai episentrum *global supply chain* yang mengharuskan Tiongkok untuk menguasai Samudera Hindia dan Pasifik (Anwar, 2020). Kondisi ini tentunya cukup mengganggu negara lain, termasuk Amerika Serikat selaku *existing hegemony*. Kedua, pendekatan *threat-deterrence* oleh Amerika Serikat terhadap penerjemahan kawasan melalui pembentukan aliansi semakin memaksa negara di kawasan, khususnya Asia Tenggara untuk memilih. (Anwar, 2020) Adapun kedua tantangan tersebut berpotensi untuk memecah negara Asia Tenggara ke dalam blok-blok strategis, sehingga kondisi tersebut harus dihindari. Di tengah meningkatnya nuansa rivalitas di dalam struktur, ASEAN merespon dengan mengadopsi dokumen ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, sebagai bentuk sikap ASEAN terhadap konstruksi kawasan Indo-Pasifik.

Thucydides trap menurut Prof. Dewi Fortuna Anwar dalam wawancara bersama periset, merupakan ‘nuansa struktur’ yang ingin dihindari oleh sepuluh negara anggota ASEAN dengan memastikan sentralitas ASEAN tetap menjadi *rule of the game* di dalam kawasan (Anwar, 2020). Harapannya, dengan menjamin sentralitas ASEAN melalui pelbagai pembentukan norma dan dialog dapat memperkuat peran ASEAN sebagai *Bridge-Building* antar kekuatan berpengaruh dalam konstruksi Indo-Pacific. Amitav Acharya dalam risetnya berjudul *Why ASEAN’s Indo-Pacific Outlook Matters* menjelaskan bahwa AOIP merupakan bentuk sikap sendiri ASEAN yang merefleksikan nilai dan pengetahuan bersama antar negara anggotanya mengenai bagaimana keamanan dapat tercapai melalui pembentukan norma dan proses *confidence building* antar negara anggota dan bukan melalui pembentukan aliansi sebagaimana yang diekspektasikan oleh pihak lain atau ‘*others*’ (Acharya, 2019). Meski begitu, bukan berarti perumusan dokumen ASEAN Outlook on the Indo-Pacific tidak menghadapi penentangan oleh negara anggota ASEAN sendiri.

Periset menggunakan konsep formasi identitas kolektif yang berakar pada teori konstruktivisme dalam Hubungan Internasional karya Alexander Wendt sebagai pisau analisis utama dalam riset ini. Penggunaan konsep formasi identitas kolektif ditujukan untuk membantu periset dalam memahami dinamika dan interaksi sosial antar negara anggota ASEAN dalam menyikapi pihak eksternal yang menjadi ‘*others*’ atas munculnya konsep Indo-Pasifik. Selain itu, penggunaan konstruktivisme ditujukan untuk melihat potensi anomali pandangan tradisionalis terhadap perumusan AOIP oleh ASEAN dengan menyediakan alternatif realita sosial yang bersumber dari interpretasi atau pemaknaan negara anggota ASEAN sebagai ASEAN terhadap kompetisi strategis Tiongkok dan Amerika Serikat di Kawasan Indo-Pasifik.

KERANGKA KONSEPTUAL

Formasi Identitas Kolektif

Konstruktivis menempatkan identitas dan kepentingan sebagai sebuah *endogenous*, atau variabel yang mempengaruhi interaksi dan perubahan struktur. Konsekuensinya, perubahan struktur dapat terjadi ketika agen mengidentifikasi siapa dirinya dan apa keinginannya. Konstruktivisme mencermati bahwa pengetahuan bersama terinternalisasi penuh ketika aktor berhasil mengidentifikasi dan mengeneralisir yang lain (*other*) sebagai bentuk pemahaman mereka terhadap diri (Wendt, 1999).

Identifikasi tersebut, atau perasaan menjadi bagian dari kelompok tertentu, atau kita merupakan gambaran dari identitas kolektif atau identitas sosial yang menjadi pendorong para aktor untuk terus memproduksi pemahaman bersama (yang menjadi budaya) yang mereka percayai (Wendt, 1999). Jika nilai dan budaya tersebut terancam, maka secara insting, aktor yang terinternalisasi penuh akan melindunginya. Aktor tetaplah rasional, namun apa yang menjadi dasar perilaku rasional mereka adalah kelompok (*in-group*) melalui identitas sosial (Wendt, 1999). Oleh karena itu, terbentuknya identitas kolektif akan mendorong aktor untuk menyelesaikan permasalahan secara kolektif.

Dalam konteks hubungan internasional, Wendt menyebut pembentukan *in-group* yang berasa dari identitas kolektif sebagai pembentukan negara-negara internasional sebagai transformasi struktural dari sistem Westphalia (Wendt, 1994; Hal. 391). Ruang lingkup identitas kolektif bergantung pada kontestasi, kalkulasi biaya, isu, dan waktu menjadikannya dalam ruang lingkup bilateral, regional, hingga global (Wendt, 1999; Hal. 356). Dalam pengaplikasiannya, Formasi Identitas Kolektif memiliki empat buah variabel yang di dalamnya terdiri dari tiga variabel kausatif, dan satu variabel permisif. Variabel permisif terdiri dari interdependensi, nasib yang sama, dan homogenitas. Sementara itu, variabel kausatif hanya terdiri dari pengendalian diri.

METODE RISET

Periset menggunakan metode penelitian deskriptif analisis diskursus oleh Christopher Lamont. Analisis diskursus merupakan metode kualitatif yang berfokus pada proses interpretasi terhadap bentuk komunikasi linguistik. Analisis diskursus mendorong periset untuk (1) melihat dunia sebagai konstituen oleh aktor yang identitasnya terbentuk melalui pemahaman intersubjektif; (2) memahami bahwa bahasa memainkan peran kunci dalam menyusun objek yang diteliti; (3) memahami bagaimana dan mengapa wacana tertentu muncul, menjadi dominan, dan digunakan oleh aktor (Lamont, 2015). Dalam konteks riset ini, metode riset kualitatif analis diskursus dapat memfasilitasi tujuan periset untuk memahami interaksi antar negara anggota ASEAN yang membentuk pengetahuan bersama (intersubjektif) ASEAN mengenai arsitektur kawasan Indo-Pasifik. Proses riset ini mencakup pengumpulan data secara induktif melalui tema-tema *particular* hingga *general*. Kemudian, Periset membuat *coding* atas data yang telah dikumpulkan yang dilanjutkan dengan proses triangulasi data oleh periset.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A View from a Within: Proses perumusan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)

Indonesia merupakan negara Asia Tenggara pertama yang mengembangkan konstruksi kawasan Indo-Pasifik melalui pidato Marty Natalegawa yang berjudul *an Indonesian Perspective on the Indo-Pacific* dalam acara *conference of Indonesia* di Washington Dc, tahun 2013. Saat itu, Marty telah menggaris bawahi potensi *geographical expansion* yang menuntun berkembangnya kawasan Indo-Pacific menjadi arena rivalitas kekuatan besar dalam beberapa tahun kedepan. *Deficit trust* antar negara di kawasan merupakan suatu kondisi yang harus dihindari. Oleh karena itu, Marty Natalegawa mengusulkan agar ASEAN menggunakan prinsip *outreaching* melalui TAC yang ditujukan untuk menjaga *Dynamic Equilibrium* kawasan. Selain itu, ASEAN harus mampu

mendorong penciptaan *new center of economic growth* untuk mengubah orientasi pengembangan kawasan, dari yang sebelumnya berfokus pada isu keamanan strategis, menjadi kerja sama ekonomi. Sehingga, kondisi struktur kawasan tetap terjaga pada nuansa *positive sum game*.

Tahun 2014 merupakan tahun pertama konsep Indo-Pasifik diperkenalkan Indonesia ke negara anggota ASEAN, tepatnya dalam rangkaian acara *9th East Asia Summit* Nay Pyo Taw, Myanmar. Saat itu, konsep Indo-Pasifik masih dikenal dengan istilah PACINDO, yakni sebuah konsep arsitektur kawasan yang menekankan pentingnya sentralitas ASEAN sebagai ‘*bridge builder*’ terhadap rivalitas *extra-regional power* yang terdapat di kawasan. “*Sebagai Poros Maritim Dunia, Indonesia tentu berkepentingan untuk ikut menentukan masa depan kawasan PACINDO* yang terdiri dari *Indian Ocean Region* dan *Pacific Region*”.

Potongan pidato tersebut merupakan *expressive gesture* pertama Presiden Joko Widodo mengenai PACINDO di hadapan negara anggota ASEAN. Tahun 2015, pembahasan diskursus Indo-Pacific lebih didorong Indonesia pada tingkat domestik, terlebih ketika Indonesia memasukan konstruksi kawasan Indo-Pasifik kedalam RENSTRA KEMLU 2015-2019. RENSTRA tersebut telah mencantumkan pengembangan konstruksi kawasan Indo-Pasifik yang mengedepankan ***mutual trust*** dan ***confidence building*** dengan ASEAN sebagai *focal point* (KEMLU RI, 2015). Pengembangan konstruksi kawasan Indo-Pasifik di ASEAN kembali dilanjutkan pada tahun 2018, tepatnya dalam penyelenggaraan *32nd ASEAN Summit*, Singapura. Presiden Joko Widodo kembali menunjukkan *expressive gesture* melalui pengajuan proposal *Indonesia Indo-Pacific Strategy* dihadapan negara anggota ASEAN. “*Sentralitas ASEAN sangatlah penting dalam menciptakan struktur kawasan yang kondusif terhadap kultur kerja sama guna mendorong konstruksi kawasan Indo-Pacific sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia*”, ujar Presiden Joko Widodo (Sekretariat Kabinet, 2018). Upaya delegasi Indonesia saat itu berhasil menjadikan *Indo-Pacific Strategy* sebagai agenda bersama ASEAN, yang terefleksikan dalam *Chairman’s Statement* *32nd ASEAN Summit* 2018.

Perkembangan berikutnya terjadi dalam pertemuan ke-8 *East Asia Summit Foreign Minister Meeting*, Agustus 2018. Saat itu, H.E Retno Marsudi memperkenalkan delapan halaman *draft* proposal strategi Indo-Pacific dihadapan sembilan menteri luar negeri negara anggota beserta negara mitra ASEAN. Retno juga menegaskan *Indo-Pacific Strategy* ASEAN yang mengedepankan prinsip keterbukaan, transparan, dan inklusif (Septiari, 2018). Delapan halaman proposal yang disampaikan oleh Retno Marsudi mendapatkan respon beragam dari kesembilan negara anggota ASEAN lainnya. Prof. Dewi Fortuna Anwar dalam wawancara bersama periset menjelaskan bahwa terdapat tiga *bloc* dalam proses dialog dan konsultasi konsep awal *Indo-Pacific Strategy* pada pertemuan AFMM 2018 tersebut. *Bloc* pertama ialah negara pendukung dan sponsor yang terdiri dari Indonesia dan Thailand. (Anwar, 2020). *Bloc* kedua adalah negara yang masih skeptis terhadap konsep *Indo-Pacific strategy* yang terdiri Singapura, Myanmar, Laos, Kamboja (Anwar, 2020).

Sedangkan, *Bloc* ketiga diisi oleh negara yang masih memutuskan untuk netral, diantaranya: Malaysia, Vietnam, Filipina dan Brunei Darussalam. Menurut Prof Dewi Fortuna Anwar, perbedaan pandangan yang terjadi antar negara anggota ASEAN dilatarbelakangi oleh berbagai isu. Untuk negara Mekong, poin yang menjadi perhatian ialah kekhawatiran mereka terhadap investasi Tiongkok, mengingat konsep Indo-Pacific yang muncul dari beberapa negara saat itu dinilai kurang ramah terhadap presensi Tiongkok di kawasan (Anwar, 2020). Sementara itu, untuk Singapura, poin yang menjadi penekanan ialah pada bagaimana Indo-Pacific Strategy ASEAN dapat merespon Free and Open Indo-Pacific (FOIP) Amerika Serikat serta implikasi strategisnya terhadap perkembangan arsitektur kawasan (Anwar, 2020).

Meski terdapat beberapa perbedaan pandangan, keinginan Indonesia untuk terus mendorong pembahasan *Indo-Pacific Strategy* dalam pertemuan ke 13th East Asia Summit bulan November tahun 2018 dapat tercapai. Hal tersebut termaktub di dalam *Joint Communiqué of the 51st ASEAN Foreign Ministers Meeting*, bahwasannya sepuluh negara ASEAN bersepakat untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait konsep arsitektur kawasan Indo-Pacific yang mengedepankan prinsip keterbukaan, transparan, dan inklusif. (ASEAN, 2018)

Tabel 1. Tiga Blok Pertama Dalam Dialog ASEAN mengenai *Indo-Pacific Strategy*

Optimis	Skeptis	Netral
Indonesia dan Thailand	Singapura, Myanmar, Laos, Kemboja, Vietnam	Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam

Sumber: Penulis

Pembahasan mengenai *Indo-Pacific Strategy* ASEAN kemudian berlanjut pada pertemuan 13th East Asia Summit, November 2018. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan sikap Indonesia akan pentingnya sentralitas ASEAN dalam *Indo-Pacific Strategy*. “*Arsitektur kawasan Indo-Pacific yang terdiri dari Indian Ocean Region dan Asia-Pasifik merupakan Single Geostrategic Theatre, dengan ASEAN sebagai fulcrum-nya*” (Sekretariat Kabinet, 2018). Pembahasan mengenai Indo-Pasifik dalam EAS kali ini dilaksanakan dalam forum tertutup. Selain paparan mengenai *Indo-Pacific Strategy*, negara anggota ASEAN juga mendengarkan paparan konsep Indo-Pasifik dari beberapa negara lain seperti Jepang, Australia, dan Amerika Serikat (Scott, 2019). Dalam paparannya, Jepang turut mengakui pentingnya ASEAN Treaty, Amity and Cooperation (TAC) sebagai *gate-keeper* dalam pengembangan arsitektur kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, Jepang turut mendukung sentralitas ASEAN, baik sebagai *fulcrum of norms*, maupun *fulcrum of connectivity* yang didukung oleh prinsip keterbukaan ASEAN melalui *Indo-Pacific Strategy* (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2018).

Upaya Indonesia sebagai agen di dalam struktur ASEAN untuk mendorong diskursus *Indo-Pacific Strategy* pada tahun 2018 diakhiri dengan terselenggaranya 33rd ASEAN Summit di Singapura. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan diantara ASEAN Leader perihal penguatan konsep *ASEAN-Centric Regional Architecture* (ASEAN, 2018). Selain itu, juga terdapat pengakuan bersama mengenai prinsip utama *Indo-Pacific Strategy* ASEAN, antara lain: *ASEAN Centrality, openness, transparency, inclusivity, serta rules-based approach*. (ASEAN, 2018) Untuk kesekian kalinya, diskursus mengenai pengembangan *Indo-Pacific Strategy* ASEAN kembali masuk dalam *Chairman Statement* 33rd ASEAN Summit 2018, tepatnya pada butir ke 42 dan 43 (ASEAN, 2018). Selain menempuh jalur multilateral melalui pelbagai forum, Indonesia selaku agen di dalam struktur ASEAN juga menempuh jalur bilateral terhadap sesama negara anggota ASEAN seperti Vietnam dan Laos, serta beberapa negara mitra dialog seperti India, Jepang, dan Australia. Untuk Vietnam, proses konsultasi dan dialog berlangsung pada pertemuan *Indonesia-Vietnam Summit* 2018.

Sebelum akhirnya Vietnam memutuskan untuk kooperatif terhadap konsep *Indo-Pacific Strategy* usulan Indonesia, mereka menggaris bawahi dua isu yang harus menjadi perhatian ASEAN dalam pengembangan arsitektur kawasan, yaitu: (1) Menjaga dan memastikan keamanan, kebebasan navigasi dan penerbangan di kawasan; (2) Mendorong upaya demiliterisasi di Laut Tiongkok Selatan. (Scott, 2019) Indonesia dan Vietnam pada akhirnya menemui jalan tengah untuk kedua isu tersebut, melalui perumusan dua rekomendasi, antara lain: (1) *Indo-Pacific Strategy* ASEAN harus menyediakan ruang diplomatik dalam penyelesaian sengketa teritorial (2) *Indo-Pacific Strategy* ASEAN harus mendorong

konektivitas yang menjamin keamanan serta kebebasan navigasi dan penerbangan di kawasan. (Scott, 2019)

Adapun luaran dari pertemuan bilateral Indonesia-Vietnam ialah perubahan sikap Vietnam untuk mendukung pengembangan diskursus ASEAN mengenai arsitektur kawasan Indo-Pacific. Negara anggota ASEAN berikutnya yang melakukan dialog dan konsultasi bersama Indonesia adalah Laos. Laos mempertanyakan kondisi mereka sebagai negara *land-locked*, dikarenakan Indo-Pacific Strategy ASEAN pada awal pembentukannya sangat mengarah pada domain maritim. Dari pertemuan tersebut, ditarik kesepakatan bahwa Indo-Pacific Strategy juga akan berfokus pada agenda pembangunan berkelanjutan SDG's serta terdapat upaya untuk menghubungkan agenda pengembangan sub-kawasan *great-mekong* sebagai bagian dari kerja sama konektivitas dalam Indo-Pacific Strategy ASEAN. (Pramono, 2019)

Tabel 2. Tiga Blok Dalam Dialog ASEAN Indo-Pacific Strategy Pasca 33rd ASEAN Summit

Optimis	Skeptis	Netral
Indonesia, Thailand, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam dan Myanmar	Singapura dan Kamboja	Malaysia dan Filipina

Sumber: Penulis

Tahun 2018 tidak hanya menjadi tahun bagi Indonesia untuk menyebarluaskan diskursus Indo-Pacific Strategy ASEAN. Prof. Dewi Fortuna Anwar dalam wawancara bersama periset menegaskan pentingnya peran Thailand dalam mensponsori gagasan Indo-Pacific di ASEAN melalui pendekatan yang mereka lakukan terhadap negara ASEAN di sepanjang wilayah Indo-China (Anwar, 2020). Menurut Pitti Sri Sangnam, dalam risetnya berjudul *Future Direction of Regional Development in the Indo-Pacific Region* menjelaskan tiga gagasan yang diusung Thailand dalam mengembangkan diskursus Indo-Pacific Strategy ASEAN, antara lain: (1) *Deeper and broader ASEAN regional integration*, (2) *ASEAN Connectivity*, (3) *Deeper cooperation on SEZs and EEC* (Sri Sangnam, 2018). Khusus untuk poin kedua dan ketiga, Thailand memberikan penekanan pada pentingnya ASEAN untuk menghubungkan proyek ASEAN Connectivity seperti pada kerja sama pengembangan Great Mekong Sub-Region kedalam pusat perekonomian baru arsitektur kawasan Indo-Pacific versi ASEAN. Secara implisit, Thailand mendorong adanya sinergi antara pengembangan domain darat dan domain laut dalam Indo-Pacific Strategy ASEAN guna menjaga aspek kebermanfaatannya bagi seluruh negara anggota ASEAN (Sri Sangnam, 2018). Menurut Prof. Dewi Fortuna Anwar dalam wawancara bersama periset, setelah melalui proses dialog yang panjang, baik yang dilakukan oleh Indonesia maupun Thailand, Vietnam, Laos, dan Myanmar menyatakan dukungannya terhadap pengembangan arsitektur kawasan Indo-Pacific pasca 33rd ASEAN Summit berlangsung akhir tahun 2018 (Anwar, 2020).

Tahun 2019 merupakan tahun dimana kesepuluh negara ASEAN mencapai kata sepakat untuk menandatangi dokumen ASEAN Outlook on The Indo-Pacific. Setidaknya, terdapat dua proses negosiasi dan dialog yang menjadi kunci dari tercapainya kesepakatan antara sepuluh negara anggota ASEAN, yakni: *Jakarta High Level Dialogue on the Indo-Pacific* pada maret 2019, serta *ASEAN Foreign Minister Meeting* yang bertepatan dengan *34th ASEAN Summit* di Bangkok Thailand. Jakarta High Level Dialogue on the Indo-Pacific merupakan dialog tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh Indonesia dengan mengundang pimpinan eksekutif negara ASEAN serta negara-negara di sepanjang arsitektur kawasan Indo-Pacific yang diselenggarakan pada bulan Maret tahun 2019.

Upaya serupa juga pernah dilakukan oleh Thailand saat Singapura masih berstatus sebagai chair

ASEAN pada tahun 2018 (Anwar, 2020). Siswo Pramono, selaku kepala penanggung jawab penyusunan proposal Indo-Pacific Strategy Indonesia, menegaskan pentingnya peran pertemuan *Jakarta High Level Dialogue on The Indo-Pacific* sebagai proses paralel yang bertujuan untuk melihat perspektif nasional negara anggota ASEAN di luar keanggotaan ASEAN (Septiari, 2019). Terdapat dua topik utama yang menjadi bahasan sepuluh negara anggota ASEAN dalam forum dialog tersebut.

Pertama, penegasan kembali sentralitas ASEAN, yang mana dalam konteks operasional, ASEAN harus menjadi pusat kendali atas agenda, langkah, dan bentuk pengambilan keputusan yang merupakan konsensus dalam rangkaian pengembangan arsitektur kawasan Indo-Pacific (Weatherbee, 2019). Kedua, ASEAN tidak akan menciptakan mekanisme baru, tetapi lebih ingin mengoptimalkan mekanisme Outreach yang sudah ada melalui kerangka institusi turunan seperti East Asia Summit, ASEAN Plus, ADMM Plus, dan AMF (Weatherbee, 2019).

Menteri luar negeri Indonesia, H.E Retno Marsudi secara personal meyakinkan Menteri Luar Negeri Kamboja H.E Prak Sokhon, bahwa konsep Indo-Pacific ASEAN tidak akan menciptakan *new regional architecture* yang berdampak pada perubahan struktur geopolitik ASEAN (Weatherbee, 2019). Donald E Weatherbee dalam risetnya yang berjudul *Indonesia, ASEAN, and the Indo-Pacific Cooperation Concept* menjelaskan, ketiadaan mekanisme baru berimplikasi terhadap ketiadaan perubahan sikap ASEAN terhadap Tiongkok, serta menegaskan penggunaan domain ekonomi sebagai instrumen utama pengembangan arsitektur kawasan Indo-Pacific oleh ASEAN (Weatherbee, 2019). Hal tersebut dapat dipahami, mengingat hampir semua negara anggota ASEAN cukup bergantung dengan investasi langsung dari Tiongkok mulai dari Kamboja, Laos, Thailand, Filipina, Malaysia, hingga Indonesia.

Tabel 3. Tiga Blok Dalam Dialog ASEAN Indo-Pacific Strategy Pasca Jakarta High Level Dialogue 2019

Optimis	Skeptis	Netral
Indonesia, Thailand, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, Kamboja dan Myanmar	Singapura	Malaysia dan Filipina

Sumber: Penulis

Artinya, berbeda dengan konsep Indo-Pacific dari negara Quad's yang menganggap Tiongkok sebagai sumber ancaman, ASEAN melalui konsep Indo-Pasifik-nya tetap menginginkan adanya inklusifitas dan keterbukaan terhadap entitas manapun, dengan catatan penggunaan mekanisme ASEAN sebagai *rule of the game*. Adapun pertemuan Jakarta High Level Dialogue berhasil meyakinkan Kamboja untuk memiliki pandangan optimis terhadap konsep Indo-Pacific ASEAN, meskipun Singapura masih skeptis terhadap konsep tersebut. Alasan Singapura untuk skeptis terhadap konstruksi Indo-Pacific ASEAN ialah ketiadaan respon ASEAN terhadap Indo-Pacific Strategy yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat pada tahun 2018 (Glenn Ong, 2019).

Dinamika dalam pembentukan pemahaman bersama di ASEAN merupakan hal yang lumrah terjadi. Perbedaan pandangan dalam tubuh ASEAN justru menunjukkan ketiadaan wacana dominan yang disertai dengan keberadaan ruang bagi setiap negara untuk menyampaikan aspirasinya terhadap suatu isu tertentu, atau dalam konteks riset ini ialah pembentukan diskursus ASEAN mengenai arsitektur kawasan Indo-Pacific.

Oleh karena itu, Dewi Fortuna Anwar dalam wawancara bersama periset turut mengakui pentingnya pertemuan *Jakarta High Level Dialogue on Indo-Pacific* sebagai arena yang memfasilitasi pembentukan diskursus antar negara anggota ASEAN melalui pembentukan ruang dialog yang memungkinkan tersampaikannya semua pandangan negara anggota dalam upaya pengembangan diskursus arsitektur kawasan Indo-Pacific oleh ASEAN (Anwar, 2020).

Selanjutnya, ASEAN Foreign Minister Meeting yang bertepatan dengan 34th ASEAN Summit sebagai pertemuan kunci atas terbentuknya diskursus ASEAN mengenai konstruksi Indo-Pacific. Pertemuan tersebut berlangsung selama tiga hari, dengan proses dialog yang alot antara Indonesia, Thailand, dan Singapura. Singapura sendiri masih mempertanyakan bagaimana ASEAN harus bersikap terhadap U.S Free and Open Indo-Pacific Strategy, dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan terbentuknya fragmentasi antar negara anggota ASEAN di masa mendatang (Markar, 2019).

Aspek strategis merupakan pesan utama yang dibawa oleh Singapura dalam proses dialog tersebut. Selain itu, Singapura juga memiliki pemahaman berbeda mengenai penamaan dokumen, yang mana mereka merasa keberatan dengan penggunaan judul ASEAN Indo-Pacific Outlook yang saat itu diusung oleh Indonesia dan Thailand (Glenn Ong, 2019). Setelah melalui tiga hari proses dialog, akhirnya sepuluh negara bersepakat menandatangani sebuah sikap bersama, diskursus ASEAN mengenai konstruksi kawasan Indo-Pacific yang termaktub dalam dokumen berjudul “ASEAN Outlook on the Indo-Pacific”.

Melalui dokumen tersebut, dapat dilihat juga bagaimana ASEAN berupaya menghindari penggunaan aspek strategis dalam konstruksi kawasannya, melainkan lebih menitikberatkan pada isu developmentalisme dan *connectivity* yang berperan sebagai *bridge-builder* antar kekuatan berkepentingan di kawasan. Selain itu, tidak seperti Quad's yang mendefinisikan Tiongkok sebagai sumber ancaman, ASEAN tidak mencantumkan negara manapun sebagai sumber ancaman di dalam dokumen ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Hanya saja, terdapat penekanan pada poin penghormatan terhadap hukum internasional sebagai aturan main utama dalam konstruksi Indo-Pacific oleh ASEAN.

Formasi Identitas Kolektif ASEAN dalam Perumusan AOIP

Perlu dipahami bahwa pengetahuan bersama antar negara anggota ASEAN mengenai pengembangan arsitektur kawasan Indo-Pacific tidak muncul melalui proses yang sederhana, mengingat Indo-Pacific sebagai ketentuan geografis bukanlah bagian dari *strategic culture* ASEAN sebelumnya. Sepuluh negara anggota ASEAN memerlukan waktu selama lima tahun (efektif satu setengah tahun) untuk saling berdialog dan bertukar pikiran guna menyamakan persepsi terkait dengan konsep arsitektur kawasan Indo-Pacific oleh ASEAN.

Perdebatan dan perbedaan pandangan antar negara anggota seperti yang terjadi antara Indonesia dan Singapura atau Indonesia dan Vietnam dilatar belakangi oleh substansi yang beragam, mulai dari isu konektivitas, *maritime safety*, demiliterisasi Laut Cina Selatan, hingga prospek hubungan antara negara anggota ASEAN terhadap Tiongkok. Apabila merujuk pada konsep identitas Alexander Wendt, maka perbedaan pendapat antar negara anggota ASEAN mengenai Indo-Pacific merefleksikan adanya identitas korporat negara anggota ASEAN sebagai agen didalam struktur sosial ASEAN. Identitas korporat dapat diartikan sebagai kualitas intrisik dan *self-organizing* yang membentuk individualitas (egoistic) agen di dalam struktur sosial.

ASEAN berhasil merumuskan dokumen ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang mana dalam kacamata konstruktivisme turut merefleksikan adanya pemahaman intersubjektif atau pengetahuan bersama yang disepakati oleh kesepuluh negara anggota ASEAN. Dalam konteks AOIP, pengetahuan bersama tersebut dapat diterjemahkan sebagai pengembangan nuansa struktur kooperatif dalam arsitektur kawasan Indo-Pacific yang berbasiskan pada asas keterbukaan, transparan, dan inklusif, serta prinsip sentralitas ASEAN sebagai *driving forcenza*.

Padahal, Alexander Wendt dalam Social Theory of International Politics menjelaskan bahwa identitas kolektif dapat berubah-ubah tergantung dengan besar kecilnya kontestasi dan kalkulasi biaya-keuntungan (*payoff*), serta jenis isu dan waktu yang melingkupinya (Wendt, 1999; hal 343). Hal ini tidak terlepas dari perdebatan kognitif antara identitas korporat, atau apabila diterjemahkan dalam konteks riset ini sebagai sisi individualitas negara anggota ASEAN dalam pembentukan pemahaman bersama

mengenai arsitektur kawasan Indo-Pacific.

Oleh karena itu, bagian ini akan secara rinci menjelaskan proses pembentukan pengetahuan bersama antar negara anggota ASEAN mengenai arsitektur kawasan Indo-Pacific, kontestasi hingga besaran *payoff*-nya melalui pengaplikasian konsep formasi identitas kolektif oleh Alexander Wendt sebagai pisau analisisnya. Wendt mengidentifikasi formasi identitas kolektif melalui penyediaan tiga variabel causative berupa interdependensi, nasib bersama, homogenitas, serta satu variabel permisif yaitu pengendalian diri (Wendt, 1999).

1. Interdependensi

Sebagai variabel kausatif, interdependensi menurunkan keinginan agen untuk berpegang pada egoistik (identitas korporat) serta sikap sepihak karena sensitivitas dan kerentanan antar aktor menumbuhkan ‘masalah bersama’ yang menjadi pemicu kemunculan diskursus perihal apa yang harus “kita” lakukan (Wendt, 1999; hal 344-349). Adapun sensitifitas sebagai komponen dalam interdependensi berbicara mengenai bagaimana perubahan situasi dari satu agen dapat berpengaruh terhadap agen yang lain. Sementara itu, kerentanan dapat diartikan sebagai biaya yang harus ditanggung oleh agen apabila harus mengakhiri hubungan dalam struktur sosial (Wendt, 1999; hal 344-349).

Wendt menambahkan, pembentukan sensitivitas dan kerentanan dilakukan melalui proses identifikasi tidak hanya terjadi dalam konteks perilaku, melainkan juga secara verbal. Identifikasi secara verbal terjadi ketika agen-agen dalam struktur sosial masuk ke dalam sebuah kerja ideologis, yang mana mereka saling berbicara, berdiskusi, dan mengedukasi diri untuk menciptakan pengetahuan bersama dan pemahaman mengenai kita. Proses verbal ini, dapat menimbulkan *swift trust*, terutama apabila terdapat kepemimpinan yang memulai diskursus terkait dengan apa yang harus “kita” lakukan (Wendt, 1999; hal 344-349).

Perlu diingat, bahwa Indo-Pacific bukanlah bagian dari *strategic culture* ASEAN sebelumnya. Hingga akhirnya, pada tahun 2014, Indonesia melalui pidato Presiden Joko Widodo dalam pertemuan East Asia Summit ke-9 memperkenalkan PACINDO sebagai visi pengembangan arsitektur kawasan Indo-Pasifik kepada negara anggota ASEAN. Proses ini merupakan babak penting berkembangnya diskursus Indo-Pasifik dalam struktur sosial ASEAN. Sebagaimana pernyataan Wendt, interaksi sosial melalui proses dialog membantu agen untuk menegosiasikan kembali tujuan bersama mereka dalam suatu struktur sosial (Wendt, 1999; Hal 344-349).

Hasilnya, kesepuluh negara ASEAN menyetujui semua usulan blok skeptis dan secara eksplisit menolak untuk mengekslusikan presensi Tiongkok di dalam kawasan dengan tidak mencantumkan Tiongkok sebagai sumber ancaman dalam dokumen ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Apabila menilik kembali interaksi sosial antara negara anggota ASEAN tersebut, terlihat bahwa keinginan negara anggota ASEAN sebagai agen untuk berpegang pada egoistik perlahan menurun seiring dengan terbentuknya pengetahuan bersama antar negara anggota ASEAN mengenai arsitektur kawasan Indo-Pacific.

Dalam konteks interdependensi, aspek sensitivitas dapat dipahami melalui upaya Indonesia untuk mendorong wacana konstruksi Indo-Pacific kedalam agenda ASEAN sebagai respon terhadap perubahan struktur dikawasan yang dapat mengancam sentralitas ASEAN. Munculnya *swift-trust* melalui penerimaan kesembilan negara ASEAN lainnya terhadap usulan Indonesia merupakan bukti adanya sensitifitas ASEAN terhadap perubahan struktur yang terjadi di kawasan.

Sementara itu, untuk memahami aspek kerentanan ini, periset akan berpijak pada realitas geopolitik, serta pertumbuhan ekonomi dan investasi di Asia Tenggara. Dalam realitas geopolitik, interaksi antar negara anggota ASEAN yang pada akhirnya tetap mempertahankan sentralitas ASEAN, menunjukkan kerentanan agen (negara anggota ASEAN) apabila suatu waktu perubahan struktur yang disebabkan oleh pengaruh extra-regional power dapat mengarah pada ‘balkanisasi’ negara anggota ASEAN.

Ini menunjukkan pengeluaran yang lebih besar bagi negara anggota ASEAN apabila mereka mengakhiri hubungan positif (*amity*) terhadap baik Quad dan China, sehingga penting bagi ASEAN untuk menjaga sentralitasnya yang juga bertujuan untuk menjaga hubungan yang baik antar negara anggotanya. Bagian ini menunjukkan perbedaan kerentanan bersama yang dimiliki ASEAN terhadap kerentanan *extra-regional power* seperti Amerika Serikat dan Australia, yang apabila perbedaan tersebut direfleksikan semakin memperkuat identitas kolektif ASEAN sebagai self, dan extra-regional power sebagai others.

Sementara itu, dalam realitas pertumbuhan ekonomi dan investasi, kerentanan bersama ASEAN dimotori oleh hubungan kooperatif antara Tiongkok dan negara anggota ASEAN, khususnya dalam bidang ekonomi melalui FDI dan kerja sama penguatan koneksi kawasan. Berdasarkan temuan CSIS dalam risetnya yang berjudul, Powers. Norms, and Institutions, dijelaskan bahwa Tiongkok menempati urutan pertama sebagai economic power paling berpengaruh di Asia Tenggara (Green, 2019).

Evan Laksmana dalam wawancara bersama periset menjelaskan betapa kuatnya pengaruh investasi dan skema global value chain yang berpusat di Tiongkok terhadap pembentukan kepentingan domestik negara anggota ASEAN (Laksmana, 2020). Kuatnya pengaruh tersebut bahkan menghilangkan imaji *debt-trap* dalam realitas negara anggota ASEAN, sebagaimana yang digaungkan oleh Amerika Serikat dan aliansi QUAD sebagai sumber ancaman (Laksmana, 2020). Dapat dipahami bahwa, negara anggota ASEAN akan mengeluarkan cost yang tidak sedikit apabila mereka harus mengakhiri hubungan baik dengan Tiongkok sebagai salah satu mitra dagang terbesar mereka.

2. Nasib yang sama

Sebagai variabel kausatif dari identitas kolektif, nasib yang sama merupakan variabel yang dibentuk melalui proses refleksi diri antar sekumpulan agen dengan pihak ketiga dan menghasilkan pemahaman bersama diantara mereka sebagai in-group (Wendt, 1999; Hal. 349-353). Apabila Interdependensi diproduksi oleh interaksi (verbal-nonverbal), maka nasib yang sama dibentuk oleh kehadiran pihak ketiga, melalui proses refleksi diri (Wendt, 1999).

Alexander Wendt menjelaskan hadirnya pihak ketiga dapat mempermudah proses pembentukan serta internalisasi nilai bersama dalam identitas kolektif (Wendt, 1999). Dalam konteks riset ini, variabel nasib yang sama dapat terpenuhi melalui kemunculan Amerika Serikat dan Tiongkok, yang mana keduanya berupaya untuk menerjemahkan kawasan sekaligus mempromosikan individualitas mereka melalui berbagai rangkaian kebijakan. Lee Hsien Loong dalam Shang-ri la Dialogue menyampaikan sikap singapura, dalam argumen sebagai berikut: “*World is at turning point, as U.S.-China tensions continue to grow, proposal of FOIP are welcome if the U.S. using inclusive and deeper regional cooperation, and also they shouldn't undermine ASEAN arrangements or create rival blocs, deepen fault lines or force countries to take sides*” (Dunst, 2020).

Pernyataan Lee Hsien Loong di atas menggambarkan sisi ‘egoistik’ Tiongkok dan Amerika Serikat dalam memahami nuansa struktur di kawasan. Situasi inilah yang kemudian mendorong proses refleksi negara anggota ASEAN terhadap extra-regional power sebagai others untuk segera memproduksi dan menginternalisasi pengetahuan bersama mereka terkait dengan arsitektur kawasan Indo-Pacific. Pemahaman periset tersebut terverifikasi oleh pernyataan Prof. Dewi Fortuna Anwar yang menjelaskan masuknya diskursus arsitektur kawasan Indo-Pacific kedalam agenda ASEAN memiliki motif berupa kesadaran negara anggota untuk menghindari potensi Thucydides trap di kawasan (Anwar, 2020).

Tabel 4 Perbedaan antara Quad's dan AOIP

Aspek	U.S. Indo-Pacific Strategy	ASEAN Outlook on Indo-Pacific
Geografis	Samudera Hindia – Samudera Pasifik	<i>Asia Pacific Region-Indian Ocean Region</i>
Prinsip Utama	<i>Free, open</i>	Inklusif, keterbukaan, sentralitas ASEAN
Channel	Bilateral, minilateral: aliansi strategis	Kerjasama Multilateral: dialog dan konsultasi
Area Kerja sama	Keamanan, pertahanan	<i>Economy, Maritime, Connectivity, SDG'S</i>

Sumber: Penulis

Oleh karena itu, proses refleksi yang dilakukan ASEAN terhadap perbedaan penerjemahan kawasan oleh *extra-regional power* sebagai variabel nasib yang sama semakin memperkuat identitas kolektif ASEAN, berdampak pada pembentukan swift trust terkait konsep arsitektur kawasan oleh ASEAN sebagai *self and extra-regional power* sebagai ‘*others*’.

3. Homogenitas

Sebagai variabel kausatif dalam formasi identitas kolektif, homogenitas memiliki dua implikasi dalam penyusunan identitas kolektif. Pertama, secara tidak langsung, homogenitas akan mengurangi jumlah dan tingkat konflik yang ditimbulkan oleh perbedaan identitas korporat antar aktor (Wendt, 1999; Hal. 355). Kedua, homogenitas akan membantu aktor untuk melihat yang lain sebagai refleksi, atau seperti melihat dirinya sendiri (Wendt, 1999; Hal. 355). Dalam konteks riset ini, bentuk pertama homogenitas dapat terpenuhi melalui kesamaan sejarah individualitas negara anggota ASEAN sebagai agen (negara) yang terdampak perang dingin. Sebagai akibatnya, beberapa negara seperti Vietnam dan Kamboja pernah menjadi arena proxy war bagi kekuatan utama pada saat itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet (Anwar, 2020).

Hal ini kemudian mendorong individualitas agen untuk membangun budaya dialog, dan tidak memandang aliansi sebagai jalan keluar dari penyelesaian permasalahan keamanan di kawasan yang dapat dibuktikan dengan dikedepankannya prinsip non-blok oleh negara anggota ASEAN dalam mewujudkan national resilience mereka (Anwar, 2020). Selain itu, bentuk pertama homogenitas negara anggota ASEAN juga dapat terpenuhi melalui munculnya agenda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas domestik negara anggota ASEAN.

Dewi Fortuna Anwar dalam wawancara bersama periset menjelaskan bahwa masuknya agenda pembangunan dan pertumbuhan sebagai prioritas domestik, mendorong negara anggota ASEAN untuk menciptakan berbagai kerangka kerja sama, baik secara multilateral, bilateral, maupun regional, guna membantu mereka mewujudkan prioritas domestik tersebut (Anwar, 2020). Masuknya usulan mengenai kerja sama ekonomi biru dan infrastructure forum kedalam proses perumusan konsep indo-pacific menjadi bukti adanya prioritas domestik berupa agenda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sebagai bentuk pertama homogenitas tersebut.

Sementara itu, homogenitas dalam identitas sosial sebagai bentuk kedua dapat terefleksikan melalui dokumen final ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang disepakati oleh seluruh negara anggota ASEAN. Adapun makna sosial yang direpresentasikan oleh dokumen final AOIP, merupakan respon ASEAN terhadap pendekatan extra regional power yang dinilai tidak cocok dengan pendekatan negara anggota ASEAN.

Misalnya, pendekatan ancaman Amerika Serikat melalui pembentukan aliansi tentunya akan

tidak sesuai dengan prinsip inklusifitas dalam dokumen AOIP yang menunjukkan ketidakberpihakan ASEAN pada satu pihak tertentu sebagai pengejawantahan ‘kategori’ identitas sosial negara anggota ASEAN yang merupakan non-blok. Di sisi lain, dokumen final ASEAN Outlook on the Indo-Pacific turut memuat agenda konektivitas dan kerja sama ekonomi sebagai perwujudan new center of economic growth ASEAN di Indo-Pacific yang merefleksikan bentuk kedua homogenitas dalam identitas sosial ASEAN.

4. Pengendalian diri

Sebagai variabel pra-syarat, pengendalian diri dapat terpenuhi melalui tiga cara, yaitu: (1) Penyesuaian nilai bersama dengan cara mengkomunikasikan kepentingan antar agen dalam suatu institusi pluralis; (2) Kebijakan dan praktik domestik oleh negara sebagai identitas korporat untuk menahan diri; (3) Pengikatan diri terhadap identitas sosial yang dilandasi oleh kalkulasi pay-off, yang apabila bersifat resiprokal akan mendorong munculnya norma bersama mengenai pengendalian diri. (Wendt, 1999: hal 357-363). Prof. Dewi Fortuna Anwar dalam wawancara bersama periset menjelaskan bahwa ASEAN sendiri telah memformalkan pengendalian diri (self-restraint) ASEAN melalui penandatanganan ASEAN Leaders ‘Vision for a Resilient and Innovative ASEAN’ pada tahun 2018. (ASEAN, 2018) Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai *key principles* ASEAN guna mencapai regional resilient, salah satu diantaranya ialah Centrality of ASEAN. Sentralitas ASEAN adalah sebuah nilai institusional ASEAN yang mengutamakan peran sentral ASEAN dalam pengembangan arsitektur kawasan (ASEAN, 2018).

Sentralitas ASEAN sendiri diharapkan dapat menjadi instrumen yang menjaga harmoni serta kohesivitas negara anggota ASEAN di tengah dinamika kawasan. Pengutamaan sentralitas ASEAN merupakan bentuk pengikatan diri negara anggota ASEAN terhadap identitas sosial yang dilandasi oleh kalkulasi *pay-off*, yang didalamnya juga telah memuat proses interaksi dalam institusi pluralis, serta kebijakan dan praktik domestik agen yang mendorong norma bersama mengenai pengendalian diri. Kebijakan dan praktik domestik dapat ditilik dari usulan-usulan yang diberikan oleh kesepuluh negara mengenai pengembangan arsitektur kawasan Indo-Pacific oleh ASEAN. Oleh karena itu, dokumen final ASEAN Outlook on the Indo-Pacific telah membuktikan sentralitas ASEAN sebagai variabel pengendalian diri agen (untuk tidak memihak) yang dapat menekan sisi individualitas negara anggota ASEAN melalui terbentuknya rasa saling percaya yang didorong oleh pemahaman *self*, bahwa ‘*Others*’ memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan *self* dalam struktur sosial.

KESIMPULAN

H.E Rizal Sukma menjelaskan bahwa saat ini ASEAN dihadapkan pada sebuah tantangan berupa perilaku extra-regional power yang mencoba untuk memformulasikan dan mempromosikan pemahaman sendiri mereka terhadap arsitektur kawasan. (Sukma, 2019). Riset ini telah memberi gambaran mengenai proses pembentukan pengetahuan bersama negara anggota ASEAN perihal pengembangan arsitektur kawasan Indo-Pacific sebagai respon ASEAN terhadap dinamika kawasan. Guna memahami proses tersebut, periset melakukan penelitian yang bertujuan untuk memenuhi empat variabel formasi identitas kolektif dalam proses perumusan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific oleh ASEAN.

Variabel interdependensi terpenuhi oleh tiga hal, yakni (1) Sensitivitas negara anggota ASEAN dengan masuknya pengembangan diskursus Indo-Pacific kedalam agenda ASEAN sebagai respon terhadap perubahan kawasan dengan Indonesia sebagai pemimpin natural pendorong *swift trust*; (2) Persepsi kerentanan ASEAN dalam realitas geopolitik, bahwa dialog, pembentukan norma dan *confidence building* merupakan instrumen untuk mencapai keamanan; (3) Persepsi kerentanan ASEAN dalam realitas ekonomi, bahwa perwujudan Indo-Pacific sebagai *new center of economic growth* dapat menarik minat *extra-regional power* untuk menciptakan nuansa struktur dalam realitas

positive sum game.

Selanjutnya, variabel nasib yang sama dapat terpenuhi melalui proses refleksi yang dilakukan oleh negara anggota ASEAN terhadap perbedaan penerjemahan kawasan oleh extra-regional power sebagai ‘others’, dengan pendekatan *threat-deterrance axis* Quad’s sebagai refleksi atas pendekatan engagement-economic ASEAN. Berikutnya, variabel homogenitas yang terpenuhi melalui dua tingkat homogenitas, yakni pada tingkat identitas korporat dan identitas sosial. Pada tingkat identitas korporat, homogenitas terpenuhi melalui: (1) Persamaan pengalaman traumatis negara anggota ASEAN (identitas korporat) pada masa perang dingin; (2) Orientasi pemerintah domestik yang mengarah pada agenda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, variabel homogenitas pada tingkat identitas sosial terefleksikan melalui pembentukan ‘kategori’ pengembangan arsitektur kawasan Indo-Pacific oleh negara anggota ASEAN yang dilandaskan pada pendekatan Engagement-Economic nexus.

Terakhir, ialah variabel pengendalian diri sebagai variabel prasyarat yang terpenuhi melalui prinsip ASEAN Centrality (Sentralitas ASEAN) sebagai variabel yang dapat menekan sisi egoistik dan individualitas aktor untuk kemudian melakukan perilaku prososial, atau dalam konteks riset ini untuk merumuskan sikap bersama ASEAN terkait dengan pengembangan arsitektur kawasan Indo-Pacific. Terpenuhinya keempat variabel diatas berhasil mengantarkan periset pada sebuah kesimpulan, bahwa riset ini dapat menjawab rumusan masalah mengenai formasi identitas kolektif ASEAN dalam proses perumusan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). *A view from a within*, merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh periset melalui riset ini, bahwa negara anggota ASEAN dengan kompleksitas identitas korporatnya mampu menekan sisi egoistik mereka, hingga kemudian dapat memproduksi pengetahuan bersama serta ‘sikap ASEAN’ sebagai respon terhadap rivalitas geopolitik di kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2019, Agustus 11). *Why ASEAN's Indo-Pacific outlook matters*. Retrieved from <https://www.eastasiaforum.org/2019/08/11/why-aseans-indo-pacific-outlook-matters/>
- Anwar, D. F. (2020, Maret 12). Formasi Identitas Kolektif ASEAN dalam Proses Konstruksi ASEAN Outlook on Indo-Pacific. (M. I. Hafizon, Interviewer)
- ASEAN. (2018). *Chairman Statement on 33rd ASEAN SUMMIT 2018*. Singapura: ASEAN.
- ASEAN. (2018). *Joint Communique of the 51st ASEAN Foreign Ministers Meeting*. Singapore: ASEAN.
- Dunst, C. (2020, Februari 29). *Making the Most of US-ASEAN Ties, Even without Vegas Summit*. Retrieved from thediplomat.com/2020/02/how-trump-can-make-the-most-of-the-upcoming-us-asean-vegas-summit/
- Glen Ong, H. T. (2019, June 28). *Revised Title 'ASEAN Outlook on the Indo-Pacific' Hints at Ambivalence*. Retrieved from <https://www.iseas.edu.sg/media/commentaries/revised-title-asean-outlook-on-the-indopacific-hints-at-ambivalence-by-hoang-thi-ha-and-glenn-ong/>
- KEMLU RI. (2015). *Rencana Strategis 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Indonesia.
- Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relations*. Los Angeles: SAGE Publication.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2018). *13th East Asia Summit*. Tokyo: Ministry of Foreign Affairs of Japan.
- Pramono, S. (2019, November 25). ASEAN Outlook on Indo-Pacific. (F. UNPAD, Interviewer) Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

- Scott, D. (2019). Indonesia Grapples with the Indo-Pacific: Outreach, Strategic Discourse, and Diplomacy. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 1-24.
- Sekretariat Kabinet. (2018, November 15). *Indo-Pacific Cooperation Concept Focuses on Cooperation, Not Rivalry*. Retrieved from setkab.go.id: <https://setkab.go.id/en/indo-pacific-cooperation-concept-focuses-on-cooperation-not-rivalry-president-jokowi/>
- Septiari, D. (2018, August 15). *RI Pushes for Shared ASEAN Position on Indo-Pacific*. Retrieved from thejakartapost.com: <https://www.thejakartapost.com/news/2018/08/15/ri-pushes-shared-asean-position-indo-pacific.html>
- Shekhar, V. (2018). *Indonesia's foreign policy and grand strategy in the 21st century*. New York: Routledge.
- Sri Sangnam, P. (2018). *Future Direction of Regional Development in The Indo-Pacific Region*. Bangkok: Chulalongkorn University.
- Weatherbee, D. E. (2019). Indonesia, ASEAN, and the Indo-Pacific Cooperation Concept. *ISEAS PERSPECTIVE ISSUE: 2019 No. 47 ISSN 2335-6677*, 1-9.
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.

BIOGRAFI

Muhammad Iqbal Hafizon merupakan peneliti dari Pusat Riset ASEAN Universitas Padjadjaran yang tertarik membahas regionalisme, institusi, dan kebijakan ASEAN, khususnya dalam kontestasi Indo-Pasifik

Rizki Ananda Ramadhan merupakan mahasiswa doktoral Universitas Padjadjaran sekaligus peneliti dari Pusat Riset ASEAN Universitas Padjadjaran yang tertarik mengkaji studi keamanan, diplomasi, sekaligus studi kawasan, khususnya Indo-Pasifik